

Hussein Abri Dongoran

hussein.abri@tempo.co.id

JAKARTA — Sejumlah kalangan mengkritik pernyataan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo yang menyebut penanganan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diusut Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sulit dibuktikan untuk dibawa ke persidangan. Kejaksaan dinilai tak serius menyelesaikan perkara HAM yang merupakan janji Presiden Joko Widodo saat kampanye pemilihan presiden pada 2014.

Komisioner Komnas HAM, Choirul Anam, menuturkan cara Prasetyo tersebut merupakan tindakan menghindar dari tanggung jawab secara hukum. "Seharusnya Jaksa Agung menindaklanjuti hasil penyelidikan Komnas HAM. Dan kalau tidak cukup bukti, Jaksa Agung bisa mengeluarkan surat penghentian penyidikan," ujarnya kemarin.

Menurut Choirul, dua langkah itu bisa memperjelas status hukum perkara HAM yang sudah dilaporkan Komnas HAM ke Kejaksaan. Kejaksaan, ujar dia, juga tidak perlu takut memikirkan para korban, Komnas HAM, maupun masyarakat sipil yang bakal melakukan upaya hukum lain jika Kejaksaan menghentikan penyidikan.

Jika Kejaksaan tidak mau melakukan salah satu dari dua opsi tersebut, ujar Choirul, hal itu membuktikan bahwa Kejaksaan



Jaksa Agung H.M. Prasetyo melakukan konferensi pers di Jakarta, 2 November 2017.

Komnas Kritik Kinerja Jaksa Agung Selesaikan Kasus HAM

Prasetyo meminta perintah Presiden untuk menyelesaikan kasus ini.

Agung tidak selaras dengan keinginan Presiden yang ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. "Kalau Jaksa Agung sebut menunggu perintah Presiden lagi, itu merupakan ketidakpatuhan kepada Presiden," ujarnya.

Wakil Ketua Komisi Hukum dari Fraksi Demokrat, Erna Suryani Ranik, menguatkan pernyataan

Choirul. Menurut dia, sudah seharusnya pemerintah menyelesaikan masalah HAM dan tidak saling lempar, yakni dari tangan Presiden ke Kejaksaan maupun sebaliknya. "Kalau tidak, pemerintah tak serius menangani HAM," ujarnya.

Masalah hak asasi kembali menjadi sorotan setelah Presiden Jokowi menerima keluarga korban

Kasus HAM di Kejaksaan Agung

Setumpuk hasil penyelidikan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang diusut oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung. Namun kasus itu tidak pernah dilanjutkan ke tingkat penyidikan oleh Jaksa Agung. Bahkan beberapa berkasnya dikembalikan ke Komnas HAM. Berikut ini kasus-kasus pelanggaran HAM yang telah dilaporkan ke Kejaksaan Agung.

1. Kasus pelanggaran HAM berat 1965-1966
 - Komnas HAM menyerahkan hasil penyelidikan ke Kejaksaan Agung pada Juli 2012.
 - Kejaksaan Agung mengembalikan berkas penyelidikan pada Juni 2014.
2. Pelanggaran HAM di Talangsari, Lampung, pada 7 Februari 1989
3. Penghilangan orang secara paksa di Jakarta pada 1997-1998
4. Penembakan mahasiswa Trisakti pada Mei 1998
5. Pelanggaran HAM berat di Wasior, Papua Barat, pada 2001
6. Pelanggaran HAM berat di Wamena, Papua, pada 2003
7. Pelanggaran HAM berat di Jambo Keupok, Aceh, pada 2003

● HUSSEIN ABRİ DONGORAN

pelanggaran HAM yang kerap menggelar aksi saban Kamis di seberang Istana sejak 2017, pada Kamis pekan lalu. Pertemuan itu merupakan pertama kalinya sejak Jokowi menjabat presiden pada 2014.

Pada saat pertemuan, keluarga korban pun menyodorkan surat tertulis kepada Jokowi untuk menyelesaikan perkara HAM ini. Ketua Presidium Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan (JSKK), Maria Catarina Sumarsih, menyebut Jokowi menerima surat tersebut dan berjanji mencari solusi untuk menyelesaikan kasus HAM ini.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko pun ditunjuk Jokowi untuk menjembatani penyelesaian kasus ini.

Sedangkan penyelesaiannya tetap dilakukan oleh Kejaksaan Agung.

Jaksa Agung Prasetyo mengatakan perlu ada perintah dari Presiden serta peran lembaga lain untuk menyelesaikan kasus HAM ini. "Kami sudah bersungguh-sungguh, dan tentunya harus ada perintah dari Presiden juga," ujarnya.

Musababnya, ucap dia, sangat sulit membuktikan kasus HAM. Contohnya, kasus pelanggaran HAM pada 1965-1966 yang menurut Prasetyo sangat sulit untuk mencari para saksi, bukti, maupun terduga pelaku, yang mungkin sudah meninggal karena usia. "Makanya kami lihat realitas," ujarnya.

● DEWI HURITA